



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), INVESTASI, DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007-2010**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

**Toni Kussetiyono Irawan
NIM. 7450407105**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke bidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si
NIP. 195904211984032001

Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001



Mengetahui,

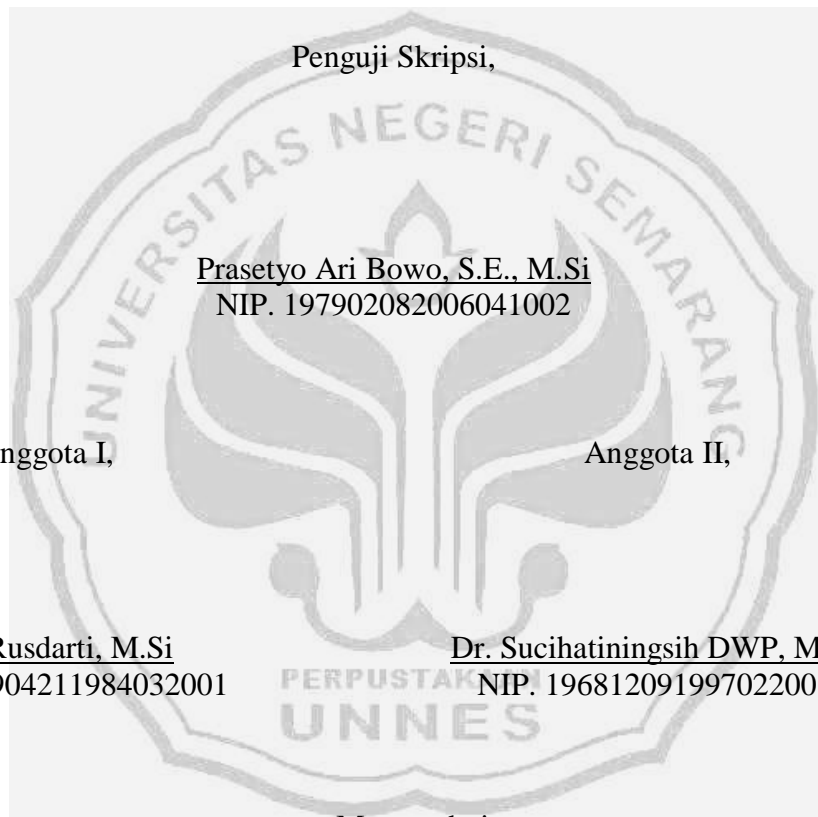
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :
Tanggal :



Penguji Skripsi,

Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si
NIP. 197902082006041002

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si
NIP. 195904211984032001

Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2013

Toni Kussetiyono Irawan
NIM. 7450407105



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Berjuang dan Semangat untuk
kehidupan yang akan datang”*

(penulis)



PERSEMBAHAN :

Karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ibu tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan pengorbanan yang begitu besar.
- ❖ Almarhum Bapak yang saya banggakan.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang, terima kasih atas doa dan motivasinya.
- ❖ Sahabat-sahabatku: Reza, Artriyana, Umam dan Maretha
- ❖ Almamaterku.

SARI

Irawan, Toni Kussetiyono. 2013. “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010*”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. Pembimbing II : Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian di suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi di suatu tahun lebih tinggi dari pada dicapai pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, dan angkatan kerja. Apakah PAD, investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah serta seberapa besar pengaruh PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana PAD, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Objek penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota yakni 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2007-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program komputer Eviews 6.0 dengan menggunakan data panel (*time series* dan *cross section*).

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,149816, 2) variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,127815, 3) variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,388708.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Saran dalam penelitian ini adalah guna meningkatkan PAD, Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dengan cara memperbaiki fasilitas yang ada di potensi unggulan sehingga mampu meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah. Selain itu diharapkan Pemerintah dapat menarik investor dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perijinan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010”**. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada- pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
3. Dr. Hj. Sucihatningsih DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin untuk melaksanakan penelitian juga Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si, Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si, Dosen Penguji atas masukan, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Ibu dan kakak-kakakku yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabatku de'cadaterz: Reza Attabbiurrobbi Annur dan Artriyah Syahnur Tirta yang susah senang tetap bersama-sama, tak akan pernah kulupakan kebaikan kalian.
8. Seseorang yang sangat spesial dalam hidupku Dwi Putri Cintiya Damayanti yang selalu menemani dan memberi motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2007 yang telah melangkah dan berjuang bersama dalam mengarungi kehidupan di kampus UNNES tercinta ini.

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Skripsi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, jika ada kritik dan saran yang membangun bagi kebaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Semarang, 13 Februari 2013

Toni Kussetiyono Irawan
7450407105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pembangunan Ekonomi.....	12
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	23
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.5 Investasi.....	28
2.6 Angkatan Kerja.....	31
2.7 Penelitian Terdahulu.....	33
2.8 Kerangka Berpikir.....	36
2.9 Hipotesis.....	38

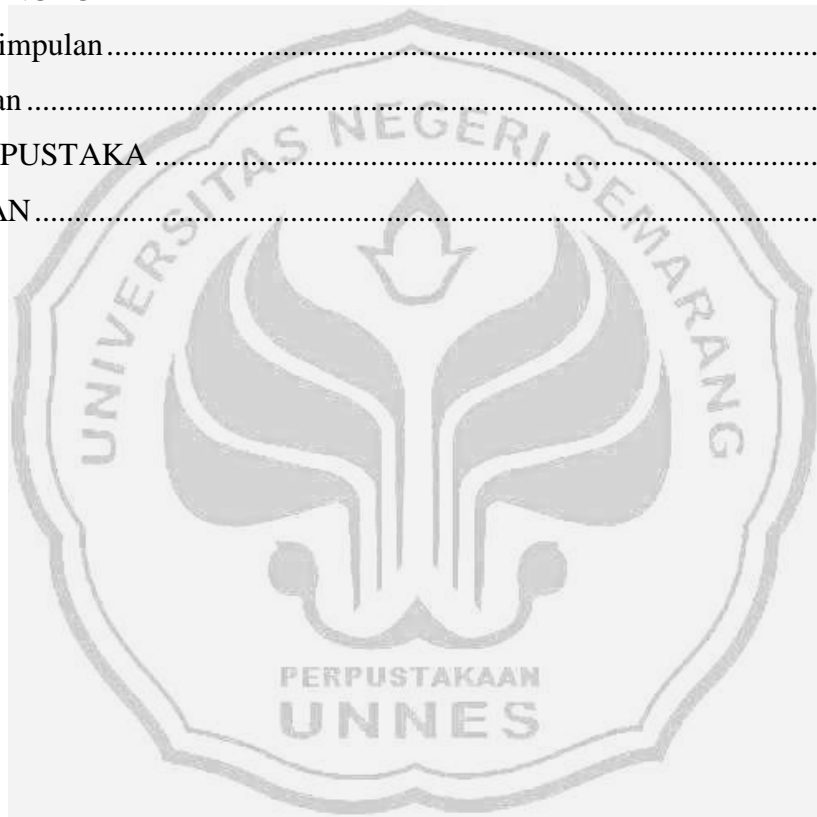
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	40
3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional	41
3.2.1 Variabel Penelitian	41
3.2.2 Definisi Operasional	41
3.3 Pengumpulan Data.....	42
3.4 Analisis Data.....	43
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	43
3.4.2 Teknik Penaksiran Model.....	45
3.4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian	48
3.4.3.1 Uji Asumsi Klasik	48
3.4.3.2 Uji Statistik.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

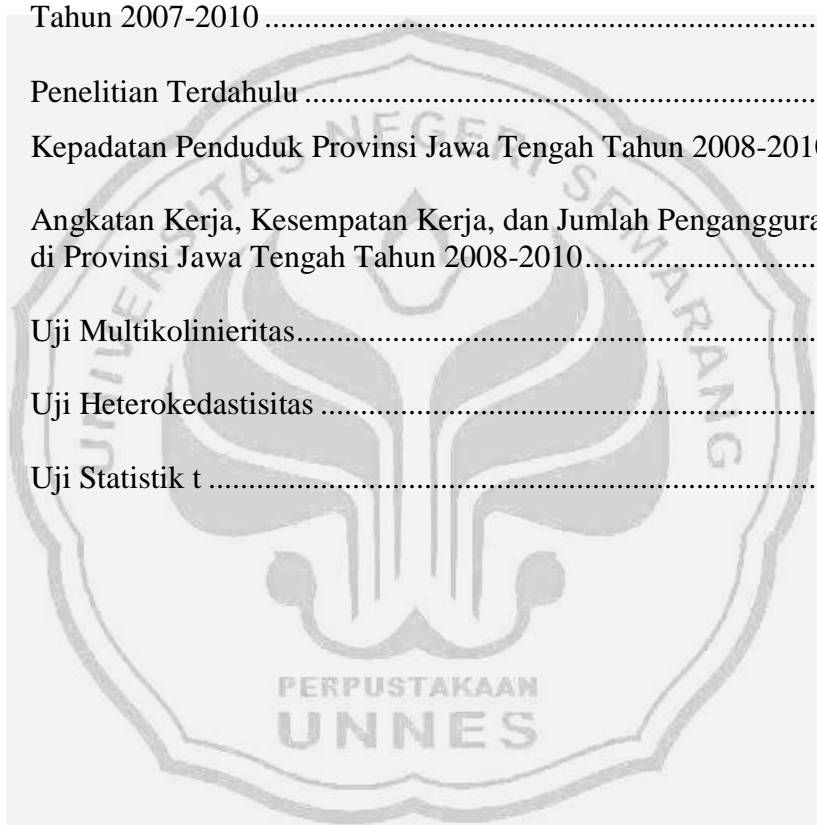
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	53
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	54
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	54
4.1.2.2. Investasi	55
4.1.2.3. Angkatan Kerja.....	56
4.1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	57
4.2 Analisis Regresi Data Panel	58
4.2.1 Teknik Penaksiran Model.....	58
4.2.2 Pengujian Model.....	59
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik	59
4.2.2.1.1 Uji Multikolinieritas.....	59
4.2.2.1.2 Uji Heterokedastisitas	60
4.2.2.1.3 Uji Autokorelasi.....	61
4.2.2.2 Uji Statistik.....	62
4.2.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62

4.2.2.2.2 Uji secara Bersama-sama (Uji F).....	63
4.2.2.2.3 Uji Parsial (Uji t).....	63
4.2.2.2.4 Model Analisis Pooled Data.....	64
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	65
4.3.2 Investasi.....	66
4.3.3 Angkatan Kerja.....	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010	4
Tabel 1.2	Realisasi Invesatsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010	6
Tabel 1.3	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010.....	53
Tabel 4.2	Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010.....	54
Tabel 4.3	Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.4	Uji Heterokedastisitas	60
Tabel 4.5	Uji Statistik t	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi P. Jawa Tahun 2007-2010.....	2
Gambar 1.2	Pendapatan Asli Daerah AHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010	5
Gambar 1.3	Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 2007-2010.....	8
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4.1	Skema Autokorelasi	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010.....	74
Lampiran 2	Nilai Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010.....	75
Lampiran 3	Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010	76
Lampiran 4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010.....	77
Lampiran 5	Input Data Olahan 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010	78
Lampiran 6	Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	82
Lampiran 7	<i>Common Effect Model</i> dengan <i>Fixed Effect Model</i>	83
Lampiran 8	Uji Likelihood.....	84
Lampiran 9	Uji Hausman	85
Lampiran 10	Uji Multikolinieritas	86

BAB I

PENDAHULUAN

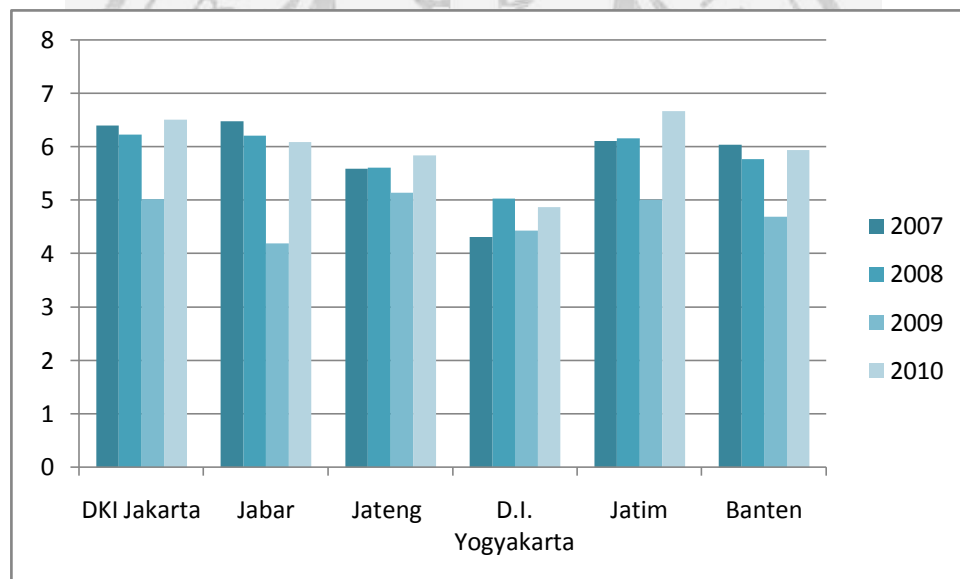
1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan pada umumnya pada masa orde baru (sampai tahun 1997) adalah sentralistik. Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak dilibatkan. Akibatnya pelaksanaan pembangunan adalah lamban karena kelemahan birokrasi yang terlalu panjang dan tumpang tindih akibat lainnya tidak jarang rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan itu ternyata tidak sesuai yang dibutuhkan masyarakat, karena daerah tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik itu. Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralistik dengan sistem desentralistik dalam sistem pemerintahan demikian pula dan sistem pembangunan. Desentralisasi berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem ekonomi daerah.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Faktor-faktor yang bisa membuat suatu daerah

memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dapat berupa kondisi alam, yaitu suatu yang sudah *given* tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia.

Perekonomian di suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi di suatu tahun lebih tinggi dari pada dicapai pada tahun sebelumnya. Dengan perkataan lain pertumbuhannya dapat tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya. Namun jika dilihat kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun tidak saja disebabkan kenaikan jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga disebabkan oleh kenaikan harga-harga .



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2010

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2011

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dari enam Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi jumlah penduduk

yang besar di banding dengan Provinsi lainnya. Jumlah penduduk yang besar ternyata membuat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar dan dapat dilihat dari gambar 1.1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2007-2010 menunjukkan kestabilan yakni pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 dan 2010 berada di peringkat kelima dibawah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 berada di peringkat pertama dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2010, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat kelima dari enam Provinsi di Pulau Jawa. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak berbeda jauh dengan Provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang kuat dalam perekonomian.

Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007-2010

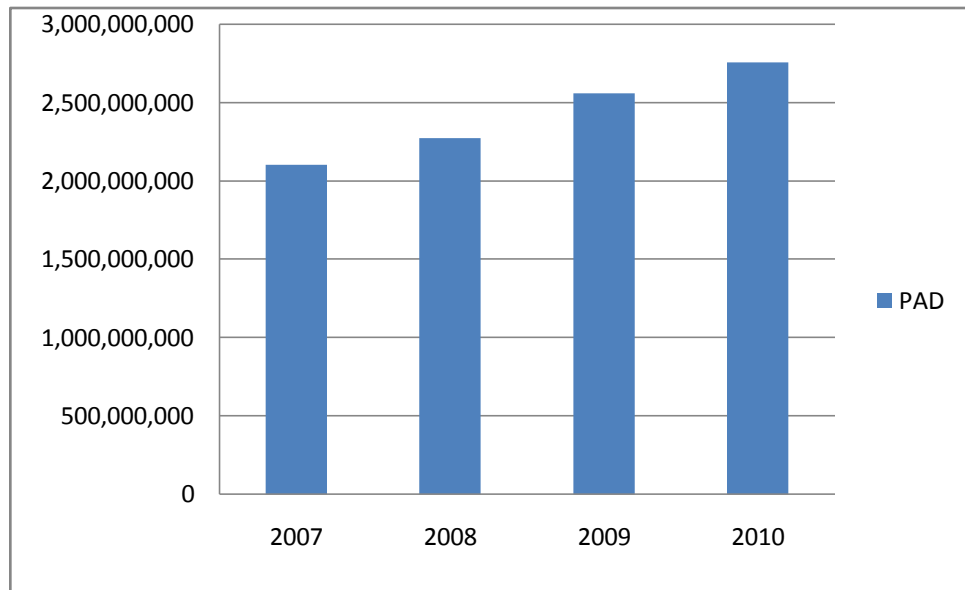
Tahun	PDRB Atas Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	159.110.253,77	-
2008	168.034.483,29	5.61
2009	176.673.456,57	5.14
2010	186.995.480,65	5.84

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi

Tabel 1.1 menunjukkan pergerakan nilai PDRB di Jawa Tengah dan Laju pertumbuhan ekonominya. Nilai PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2007 sebesar 159.110.253,77 juta rupiah menjadi sebesar 168.034.483,29 juta rupiah pada tahun 2008. Pada tahun 2009 PDRB Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar 176.673.456,57 juta rupiah dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi sebesar 186.995.480,65 juta rupiah.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan keuangan secara mandiri yang berasal dari Penadapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah memiliki sektor-sektor unggulan yang berbeda dalam memperoleh pendapatan untuk meningkatkan penerimaan daerah.



Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Atas Harga Konstan 2000 (tanpa migas) di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010
Data: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Data gambar 1.2 terlihat bahwa PAD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2010 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan PAD terjadi di 29 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penurunan PAD di Provinsi Jawa Tengah hanya terjadi di 6 Kabupaten yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.

Investasi merupakan input suatu kegiatan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja. Investasi yang semakin tinggi maka akan semakin besar mempengaruhi rendahnya pengangguran. Sebaliknya jika jumlah investasi menurun maka tingkat pengangguran akan meningkat. Selain mempengaruhi jumlah pengangguran, investasi juga

berperan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tabel realisasi investasi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

Tabel 1.2
Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007-2010
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Investasi
2007	6.185.562
2008	9.611.848
2009	11.467.050
2010	12.134.021

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah 2007-2010

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah realisasi investasi secara terus-menerus dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Realisasi investasi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 9.611.848 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 11.467.050 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2010 realisasi investasi Jawa Tengah meningkat menjadi 12.134.021 juta rupiah.

Secara alami setiap kabupaten/kota akan selalu berkembang, perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh aspek kependudukan. Kecenderungan yang terjadi setiap bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan semakin terbatasnya lahan di pusat kota dan mendorong bergesernya penduduk ke wilayah pinggiran. Kecenderungan perkembangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh adanya peningkatan kegiatan sosial ekonomi penduduk, baik yang ada di dalam kota itu sendiri maupun di daerah sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan adanya kecenderungan penduduk dari daerah sekitarnya untuk melakukan urbanisasi sehingga akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di daerah tujuan.

Tabel 1.3
Penduduk Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2010

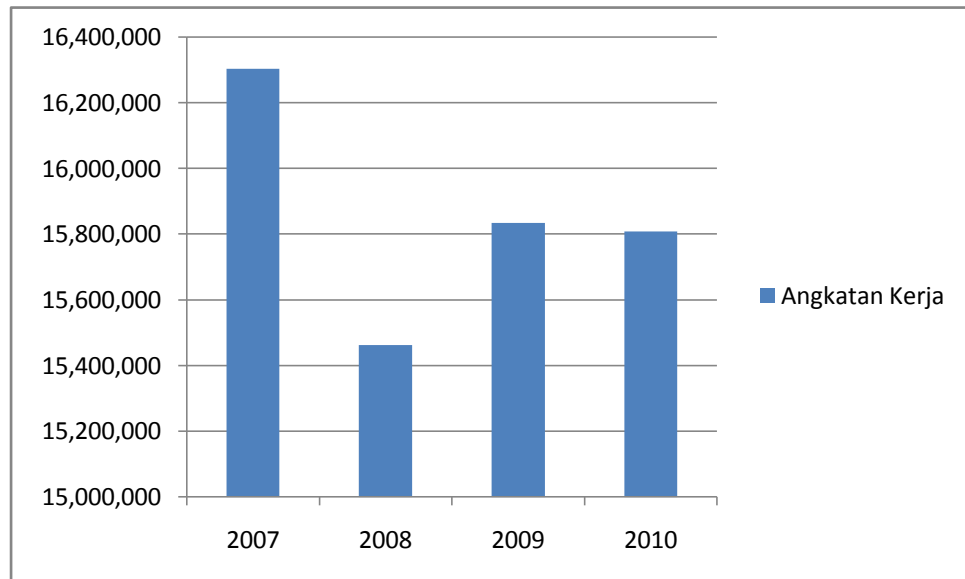
	2007	2008	2009	2010
Laki-Laki	16.202.552	16.192.295	16.123.190	16.091.112
Perempuan	16.706.308	16.434.095	16.741.373	16.291.545
Total	32.908.850	32.626.390	32.864.653	32.382.657
Rasio Jenis Kelamin	98,21	98,53	96,31	98,77

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak di Pulau Jawa. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang begitu luas, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dapat termasuk wilayah yang kepadatannya tidak terlalu padat. Dari data tabel 1.3 dapat dilihat jika jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 – 2010 selalu mengalami penurunan. Tingkat persentase rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2010 mengalami penurunan yakni tahun 2009 menjadi 96,31 sedangkan pada tahun 2008 sebesar 98,53.

Faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan adanya penambahan produksi. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang

pertumbuhannya ekonominya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.



Gambar 1.3 Angkatan Kerja yang Bekerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010

Data: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 16.304.508 orang. Pada tahun 2008, angkatan kerja turun dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 15.463.658 orang. Pada tahun 2010 yang sebesar 15.809.447 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 15.835.382 orang. Penurunan ini disebabkan ada beberapa hal antara lain yakni terjadi PHK yang mengakibatkan berkurangnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Faktor lain yang menyebabkan

terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010”

1.2 Rumusan Masalah

Data di BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 5,84% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,10%. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang berjumlah 32.382.657 jiwa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 32.864.653 jiwa sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 berjumlah 16.304.508 orang dan jumlah angkatan kerja terendah pada tahun 2008 sejumlah 15.463.658 orang. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak pernah terlepas dari kegiatan perekonomian di wilayah tersebut yakni tingkat investasi yang masuk ke daerah serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun dari tahun 2007-2010 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2010 selalu mengalami kenaikan. Latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan:.

1. Untuk menganalisis besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis besar pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a) Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan nyata.
 - b) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademika dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang Baldwin dalam Suryana (2000:4). Dari definisi ini mengandung tiga unsur:

1. Pembangunan ekonomi suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000:6) adalah:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000:67) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Suryana, 2000:3). Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan sebagai

konsep statis. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pada umumnya untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertambahan pendapatan nasional dan besarnya pendapatan perkapita (Suryana, 2000:8). Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan perkapita. Sedangkan besarnya pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk, maka tingkat pertambahan penduduk meningkat. Sebaliknya apabila tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih kecil daripada pertambahan penduduk, maka pendapatan perkapita mengalami penurunan.

Pengertian pembangunan ekonomi secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (*gross national*

product) tahunan pada tingkat 5% hingga 7% atau bahkan lebih tinggi lagi jika hal itu memungkinkan (Todaro dan Smith, 2006:19).

Menurut Widodo (2006:3) pengertian pembangunan dapat dijelaskan dengan menggunakan pandangan yang berbeda, yaitu pertama, pandangan pembangunan lama atau sering dikenal dengan pembanguana tradisional. Pembangunan dalam pandangan ini diartikan sebagai bebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Kedua mengenai pengertian pembangunan yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan modern. Pada sudut pandang ini, pembangunan dilihat sebagai upaya pembangunan yang tidak lagi menitik beratkan pada pencapaiin pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tujuan akhir melainkan pengurangan (atau dalam bentuk ekstrimnya penghapusan) tingkat kemiskinan yang terjadi, penanggulangan ketimpangan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja yang menyerap angkatan kerja produktif.

Menurut Todaro dalam Suryana (2000:5) proses pembangunan yang dilakukan haruslah memiliki tiga nilai inti pembangunan:

1. Kemampuan untu memenuhi kebutuhan dasar. Semua individu memiliki kebutuhan dasar yang menyebabkan dia bertahan hidup. Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, kesehatan dan proteksi.
2. Manusia terhormat. Salah satu komponen universal hidup adalah harga diri. Semua orang dan masyarakat mencari bentuk dasar harga diri yang mungkin kemudian disebut: keaslian, identitas, kehormatan, penghargaan atau kemasyuran.

3. Kebebasan. Kebebasan disini dipahami sebagai kebebasan yang terkait dengan emansipasi kepedulian, penderitaan dan lain-lain.

Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro dan Smith, 2006:28):

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyedia lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006:9). Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk nasional Bruto (PDB) yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil

pembangunan yang lebih merata. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif dan tertinggal akan menjadi produktif dan berkembang yang akhirnya mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah (Suryana, 2000:31):

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan. Peningkatan GNP sangat berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia seperti terlihat dalam efisiensi dan produktivitas.

2. Sumber daya alam

Sumber-sumber alam ini meliputi rumah, mineral, iklim, bahan bakar yang sering dikenal dengan sumber-sumber fisik. Pada negara-negara sedang berkembang sumber-sumber alam sering terbengkalai, kurang atau salah pemanfaatannya , sehingga menyebabkan keterbelakangan, bahkan bencana alam yang terus-menerus.

3. Pembentukan modal

Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk mesin-mesin, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, jalan raya dan infrastruktur. Pembentukan modal seperti ini bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri, sekali diciptakan modal, maka proses ini akan berkesinambungan menciptakan modal baru. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan. Keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkan kearah yang dikehendaki.

4. Teknologi dan kewirausahaan

Science, engineering, management, entrepreneurship merupakan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Perubahan teknologi secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi, sebagai hasil dari teknik penelitian baru perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh modal dan faktor produksi lainnya.

Menurut Sukirno (2006:9) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:429) yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara tersebut

mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha-pengusaha dari negara-negara/daerah-daerah yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

2. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sikap itu diantaranya adalah sikap menghemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan yang produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.

Pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2006:433). Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Teori Schumpeter menekankan peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi (Sukirno, 2006:434). Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienanan kegiatan perusahaan.

Menurut David Ricardo pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik menarik antara *Law of deminishing return* dengan kemajuan teknologi, peranan teknologi dan akumulasi modal mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya *the law of diminishing return* (Suryana, 2000:55). *The law of diminishing return* berbunyi bahwa penambahan faktor produksi (tenaga kerja) pada tanah yang terbatas, akan mengakibatkan tambahan hasil semakin berkurang.

Pendapat Neo-Klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Suryana, 2000:58):

- a) Adanya akumulasi kapital merupakan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b) Perkembangan merupakan proses gradual.
- c) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan akumulatif.
- d) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e) Aspek internasional merupakan faktor perkembangan.

Menurut Teori Neo-Klasik pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh perbaikan sumber daya manusia dan teknologi bukan oleh *capital* (Suryana, 2000:59)

Menurut Kuznet dalam Suryana (2000:64) pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis. Dalam definisi tersebut memiliki tiga komponen penting yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Peningkatan output yang terus menerus dan terpelihara merupakan manifestasi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah kematangan ekonomi.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk. Kemajuan ekonomi memberikan dasar pra kondisi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya memang suatu diperlukan, tetapi kondisinya belum cukup untuk merealisasikan pertumbuhan potensial yang terdapat dalam teknologi baru.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)

Menurut Tarigan (2005:18) Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu, yang dimaksud nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah komponen bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, pajak tidak langsung neto.

Menurut Tarigan (2005:24) metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak

langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam :

1. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan / sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang kegiatannya produksinya berbentuk fisik atau barang, seperti pertanian, pertambangan dan industri sebagainya.

2. Pendekatan pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan yang dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kalau dilihat dari

segi penggunaan maka total penyediaan /produksi barang dan jasa digunakan untuk:

- a) konsumsi rumah tangga,
- b) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- c) konsumsi pemerintah,
- d) pembentukan modal tetap bruto(investasi),
- e) perubahan stock, dan
- f) ekspor neto.

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat digunakan , yaitu:

- 1) nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
- 2) jumlah produksi fisik,
- 3) tenaga kerja,
- 4) penduduk, dan
- 5) alokator tidak langsung lainnya.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Sedangkan cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, Listrik gas dan air minum, Bangunan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

Melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan sebagai ukuran laju pertumbuhan suatu daerah.

Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan untuk penelitian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 yang dihitung menjadi persen.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerinatah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak
2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan pada penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Investasi

Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1997). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi juga untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Menurut Mankiw (2000), berdasarkan penggunaannya investasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Investasi tetap bisnis, berupa pengeluaran untuk membeli peralatan dan struktur yang digunakan untuk proses produksi.
2. Investasi residensial, berupa pembelian rumah untuk tempat tinggal atau disewakan.
3. Investasi persediaan, berupa barang-barang perusahaan yang disimpan di gudang, termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan barang jadi.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya karena ada Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Investasi memiliki peran penting sebagai pembentuk lapangan pekerjaan. Dengan adanya investasi akan menambah persediaan barang modal, hal itu akan berpengaruh pada meningkatnya kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang semakin tinggi pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di Negara yang sedang berkembang, dengan demikian investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja.

Menurut Harjanti (2005), kegiatan investasi dibedakan menjadi 2 yaitu investasi otonom dan investasi yang terdorong. Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Jenis investasi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Investasi

otonom dan investasi yang terdorong adalah investasi yang saling mendukung satu sama lain, dengan investasi otonom maka akan meningkatkan permintaan yang akhirnya mendorong investasi.

Jenis investasi juga dapat dibedakan yaitu *public investment* dan *private investment*, *domestic investment* dan *foreign investment*, *gross investment* dan *net investment*. *Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sifatnya resmi. *Private investment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. *Domestic investment* adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. *Gross investment* adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu waktu, baik itu investasi otonom atau investasi yang terdorong maupun *public investment* atau *private investment*. *Net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti perkembangan teknologi.

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap perannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan. Kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999:291).

Penelitian ini menggunakan variabel investasi jenis *domestic investment* (penanaman modal dalam negeri) dan *foreign investment* (penanaman modal asing).

2.6 Angkatan Kerja

Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menghasilkan dan menyerap produksi yang dihasilkan. Hal ini belum menjadi modal dasar yang positif bahkan jumlah penduduk yang banyak sering kali jadi penghambat.

Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force*, terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur serta yang mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (orang-orang cacat, jompo, dan orang yang sudah pensiun). Ketiga golongan bukan angkatan kerja tersebut di atas juga disebut sebagai angkatan kerja potensial, karena golongan ini sewaktu-waktu

dapat menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga kelompok ini sering disebut *potential labor force*.

Berdasarkan publikasi *International Labour Organization* (ILO), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar sembilan tahun. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja (pekerja) dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga kerja produktif. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Pengaruh positif maupun negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian suatu daerah dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah yang tidak terbatas.

Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja atau angkatan kerja yang bekerja.

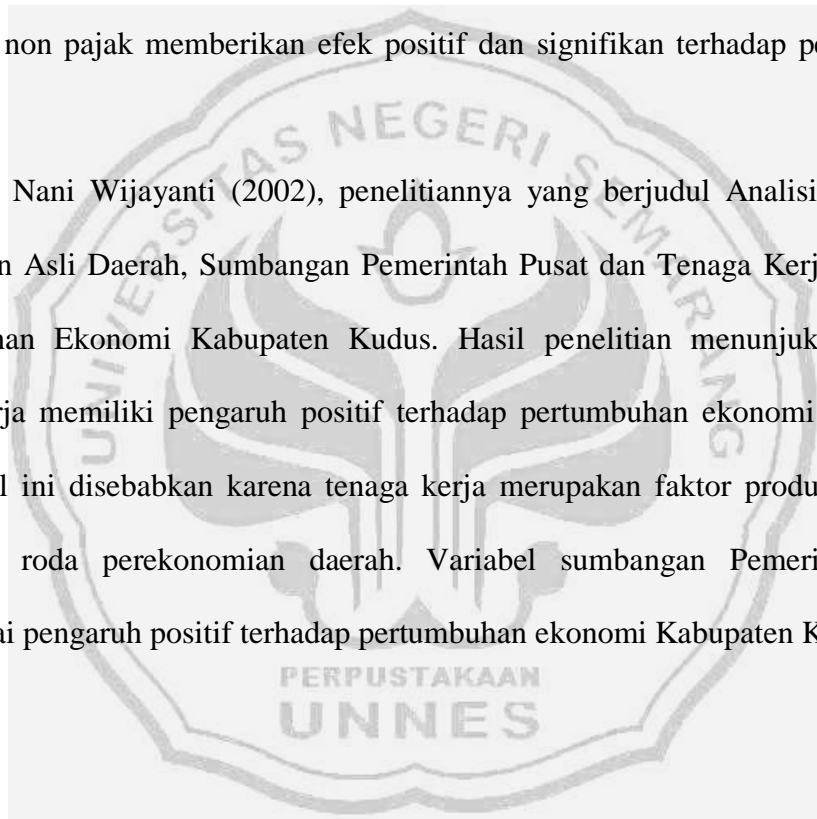
Penelitian ini menggunakan variabel angkatan kerja karena jumlah angkatan kerja yang bekerja (tenaga kerja) merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia dan mempengaruhi total produksi dari suatu daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Rochmawati Anita (2008), menganalisis Pengaruh Belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu: (1) Belanja modal berpengaruh positif secara langsung terhadap PAD, (2) PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (3) Belanja modal berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (4) Belanja modal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui PAD.

Siti Aisyah Tri Rahayu (2000), meneliti Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tanpa memasukkan hasil migas ternyata investasi pemerintah daerah mempunyai efek yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan non pajak memberikan efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sri Nani Wijayanti (2002), penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus, hal ini disebabkan karena tenaga kerja merupakan faktor produksi sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Variabel sumbangan Pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.



Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rohmawati Anita (2008) “Pengaruh Belanja modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1: Belanja Modal X2: PAD	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja modal berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2.	Siti Aisyah Tri Rahayu (2000) “Peranan Sektor Publik Lokal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1: Investasi Swasta X2: Investasi pemerintah X3: Laju pertumbuhan angkatan kerja X4: Penerimaan Pemerintah	Investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah tanpa migas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan Pemerintah dari pajak maupun non pajak memberikan efek yang positif dan

			signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Sri Nani Wijayanti (2002) “Analisis Pengaruh Penadapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus”	Y: PDRB X1: Tenaga Keja X2: Sumbangan Pemerintah Pusat X3: Pendapatan Asli Daerah	Tenaga kerja dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan data yang lebih *update* dan menggunakan variabel investasi sebagai variabel independennya. Perbedaan lainnya adalah data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel Provinsi Jawa Tengah dan diolah menggunakan Eviews 6.0.

2.8 Kerangka Berpikir

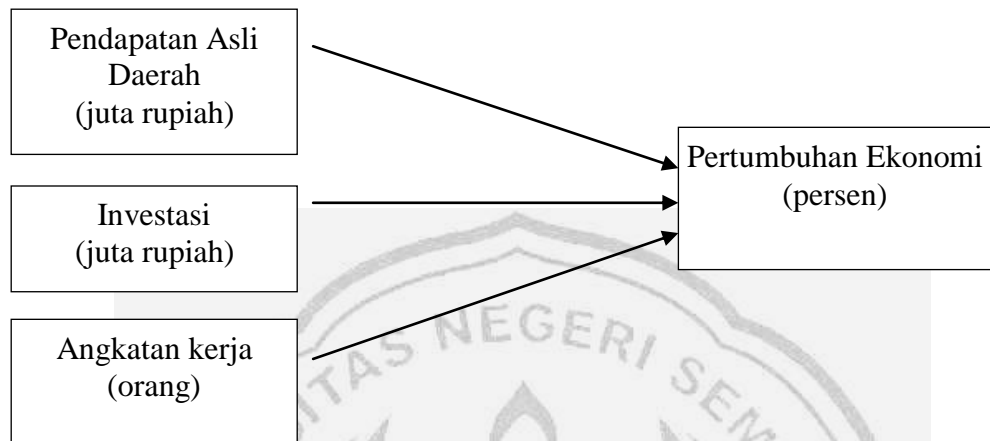
Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah satu dengan daerah lainnya merupakan fenomena yang umum dijumpai, terutama di negara berkembang. Namun tentunya bukan sebuah alasan yang tepat untuk kemudian membiarkan situasi tersebut terus berlangsung. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu PAD, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Selain itu, daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan investasi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah sebenarnya mampu memberikan akses terhadap peningkatan PAD. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif memiliki kemungkinan terhadap peningkatan PAD.

Investasi merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Angkatan kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas, dan pelaksana pembangunan di daerah sehingga dapat memajukan suatu daerah.

Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan anantara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi didalam penelitian. Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.
2. Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.
3. Angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.

4. Terdapat pengaruh secara nyata antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi dan angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisis pada data-data numerikal (angka) yang dioalah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasil pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan pada tahun 2007-2010 dalam satuan persen (variabel dependen).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 dalam satuan juta Rupiah (variabel independen).
3. Investasi 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 dalam satuan juta Rupiah (variabel independen).
4. Angkatan kerja 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007- 2010 dalam satuan orang (variabel independen).

3.2 Variabel Penelitian dan definisi operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dalam penelitian ini maka beberapa variabel yang diteliti adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Investasi
4. Angkatan Kerja

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspefikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel.

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi dan dihitung dari angka PDRB atas harga konstan tahun 2000.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diterima daerah dalam satu periode tertentu yang didapatkan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam satuan ribu rupiah.

3. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Data diperoleh dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satuan jutaan rupiah.
4. Angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun - 64 tahun (Suparmoko, 2002:114). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah dengan satuan orang.

3.3 Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2007-2010 dan data *cross section* 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui data PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 (data terbaru) Atas Dasar Harga Konstan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), angkatan kerja di Jawa Tengah yang bersumber dari dokumentasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan data investasi Provinsi Jawa Tengah dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

3.4 Analisis Data

3.4.1. Analisis Regresi Data Panel

Untuk menganalisis hubungan/pengaruh antara variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dengan variabel independen (pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja) serta untuk mengetahui sejauh mana besar dan arah dari hubungan variabel tersebut digunakan analisis regresi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang bisa diukur, diuji, dan ditransformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* maka penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*) dengan metode *General Least Square* (GLS) yang hubungan fungsionalnya dinyatakan sebagai berikut:

$$X = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \dots \dots \dots (1)$$

Regresi linier berganda adalah regresi linier dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). secara umum bentuk persamaan regresinya adalah dengan tiga variabel sebagai berikut:

$$Y = \alpha_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Selanjutnya formulasi tersebut ditransformasikan dalam bentuk semi-logaritma dengan persamaan sebagai berikut:

$$PE = \alpha_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 INVEST_{it} + \beta_3 AK_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan ekonomi

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

INVEST = Investasi

TK = Angkatan Kerja

i = 1, 2, 3, ..., 35 (data cross-section kabupaten kota di Jawa Tengah)

t = 1, 2, 3 (data time-series, tahun 2008-2010)

e = variabel pengganggu

3.4.2. Teknik Penaksiran Model

Untuk mengestimasi PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan alat analisis regresi dengan model data panel. Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Metode data panel adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis. Beberapa keunggulan data panel, yaitu sebagai berikut:

- a. Data panel bersifat heterogen.
- b. Data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat kolinieritas antar variable, lebih besar degree of freedom dan lebih efisien karena menggunakan penggabungan data *time series* dan *cross section*.
- c. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan data *cross section*, sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terdapat masalah penghilangan variabel.

Dengan mempertimbangkan keunggulan data panel di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan data panel dalam upaya mengestimasi model yang ada

Metode estimasi regresi dengan menggunakan panel data dapat dilakukan melalui tiga teknik pendekatan, antara lain:

1. *Pooled Least Square Model*

Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik estimasi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama dengan metode OLS karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengansumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, metode ini jarang digunakan sebagai estimasi utama karena sifat model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effects*)

Pendekatan ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*.

Pada metode *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobotan (*Cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukan pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2004). Penggunaan model ini tepat untuk melihat

perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data.

Pemilihan model antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian F statistic. Adapun uji Ftest yang dilakukan adalah sebagai berikut:

$$Uji F statistic = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(n - 1)}{(RSS_2/(nT - n - K))}$$

Dimana RSS_1 = Residual Sum Square metode common, RSS_2 = Residual Sum Square model *fixed effects*, n = jumlah unit *cross section*, T = jumlah unit waktu dan K = jumlah parameter yang diestimasi. Jika ternyata hasil perhitungan uji $F \geq F_{statistic}$ ini berarti H_0 ditolak, artinya intersep untuk semua unit *cross section* tidak sama. Dalam hal ini akan digunakan *fixed effect* model untuk mengestimasi persamaan regresi.

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effects*)

Dalam model efek acak (*Random Effect*), parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model effect acak juga disebut model komponen error (*error component model*).

Keputusan pemakaian model *fixed effect* ataupun *random effect* ditentukan dengan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan model *fixed effect*,

namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *fixed effect* atau dengan *random effect*.

3.4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Agar dapat menghasilkan persamaan regresi yang baik, maka harus dilakukan uji asumsi analisis regresi terlebih dahulu, yang terdiri atas:

3.4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik, agar prediksi yang dihasilkan lebih baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

3.4.3.1.1. Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi berganda. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas pada model, peneliti menggunakan regresi *auxiliary*. Regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua (atau lebih) variabel independen secara bersama-sama (misal X_2 dan X_3) mempengaruhi variabel independen yang lain (misal X_1). Selain itu juga dapat dilihat dari nilai F nya, dimana jika Nilai $F_{hitung} > F_{kritis}$ pada derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung unsur multikolinieritas. (Winarno, 2009:5.1). Multikolinieritas dalam *pooled data* dapat diatasi dengan pemberian pembootan (*cross section weight*) atau GLS. Selain itu multikolinieritas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data deret waktu sehingga dengan

mengkombinasikan data yang ada dengan data cross section secara teknis dapat mengurangi masalah multikolinieritas.

3.4.3.1.2. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2005:105) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residueul* satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode GLS (*Generalized Least Square*) memberikan pembobotan pada variasi data yang digunakan dengan kuadrat varians sehingga dapat dikatakan masalah heterokedastisitas sudah dapat diatasi dengan menggunakan GLS. Selain itu menurut Widarjono (2009:130), masalah heterokedastisitas dapat disembuhkan dengan menggunakan *weight least square* yang ada pada *Generalized Least Square* (GLS) yang memberikan pembobotan pada variasi data yang digunakan.

3.4.3.1.3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2009). Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya serta tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (*cross section*). Uji autokorelasi yang sederhana adalah menggunakan uji Durbin Watson (DW). Autokorelasi dapat dideteksi dengan cara membandingkan antara DW statistik dengan DW tabel.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.

1. Bila nilai DW statistik terletak antara $0 < d < d_l$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
2. Bila nilai DW statistik terletak antara $4 - d_l < d < 4$, H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
3. Bila nilai DW statistik terletak antara $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
4. Ragu – ragu tidak ada autokorelasi positif bila nilai DW statistik terletak antara $d_l \leq d \leq d_u$.
5. Ragu – ragu tidak ada autokorelasi negatif bila nilai DW statistik terletak antara $d_u \leq d \leq 4 - d_l$.

Menurut Gujarati (2003:370) penggunaan metode GLS (*Generalized Least Square*) dapat menekan adanya autokorelasi yang biasanya terjadi pada rumus OLS (*Ordinary Least Square*), sebagai akibat kesalahan estimasi (*underestimate*) varians sehingga dengan GLS masalah autokorelasi dapat diatasi. Asumsi terjadinya autokorelasi sering dijumpai pada estimasi yang menggunakan OLS, sedangkan pada estimasi data panel yang menggunakan metode *fixed effect* baik bersifat LSDV maupun GLS dapat mengabaikan terjadinya autokorelasi karena di dalam metode GLS terdapat pembobotan pada variasi data.

3.4.3.2. Uji Statistik

Uji statistik merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati,2010:152).

3.4.3.2.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

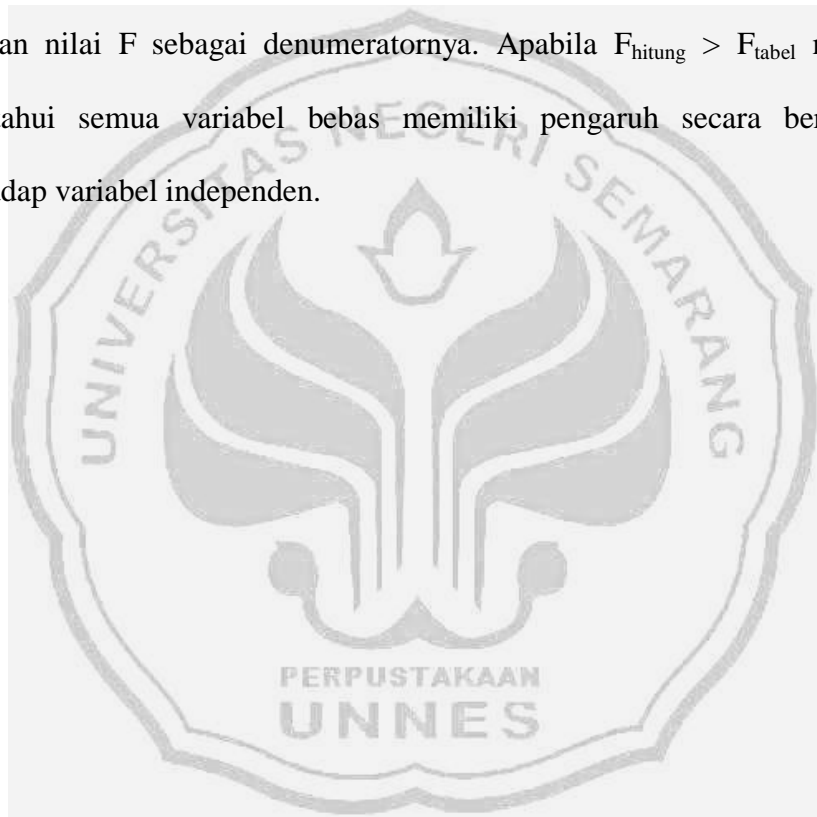
Uji R^2 pada dasarnya digunakan untuk mengetahui presentase dari model menjelaskan variasi perilaku variabel terikat. Semakin tinggi presentase R^2 (mendekati 100%), maka semakin tinggi kemampuan model menjelaskan perilaku variabel terikat.

3.4.3.2.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2001). Dalam estimasi menggunakan perangkat lunak eviews, pengukuran dapat dilihat dengan melihat t_{hitung} pada estimasi output model di setiap variabel independen kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} berdasarkan df yang disesuaikan dengan probabilitas yang digunakan. Pengambilan keputusannya yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat diketahui bahwa variabel independen tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen pada model.

3.4.3.2.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (Ghozali,2001). Dalam estimasi menggunakan perangkat lunak Eviews, pengujian statistik F dapat dilakukan dengan melihat nilai F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} menggunakan tabel F dengan nilai F sebagai denumeratornya. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat diketahui semua variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.382.657 jiwa yang menempati luas wilayah sebesar 32.544,12 km². Jumlah penduduk tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 32.864.563 jiwa, hal itu menjadi salah satu bukti bahwa program Keluarga Berencana pemerintah berhasil menurunkan pertumbuhan penduduk. Berikut tingkat kepadatan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2008-2010

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
2007	32.544,12	32.908.850	1011
2008	32.544,12	32.626.390	1003
2009	32.544,12	32.864.563	1010
2010	32.544,12	32.382.657	995

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2007 mencapai 1011 orang/Km² dan kepadatan penduduk terendah 995 orang/Km² pada tahun 2010. Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dapat

dimanfaatkan dalam pembangunan. Berikut adalah kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2010.

Tabel 4.2
Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Jumlah Pengangguran
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010
(orang)

Tahun	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Pengangguran
2007	17.664.277	16.304.058	1.360.219
2008	16.690.966	15.463.658	1.227.308
2009	17.087.000	15.835.382	1.252.267
2010	16.856.330	15.809.447	1.046.883

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2007 sebesar 17.664.277 orang, dan jumlah angkatan kerja terendah pada tahun 2008 sebesar 16.690.966 orang. Penurunan jumlah angkatan kerja diikuti oleh penurunan kesempatan kerja dan jumlah pengangguran. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebagai dampak keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pemerintah.

4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima di setiap daerah setiap tahunnya yang didapat dari sektor-sektor unggulan yang berada di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah bahwa dari tahun 2007 – 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Peningkatan PAD terjadi di 29 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penurunan PAD di Provinsi Jawa Tengah hanya terjadi di 6 Kabupaten yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di 3 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

4.1.2.2. Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi suatu investasi diharapkan output yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Output yang tinggi nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994:107).

Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata investasi tertinggi adalah Kota Semarang dengan rata-rata investasi pertahunnya sebesar Rp.2.195.774.000.000,00 dan tertinggi kedua adalah Kabupaten Rembang dengan rata-rata investasi pertahunnya sebesar Rp.989.806.000.000,00, dilanjutkan tertinggi ketiga adalah Kabupaten Semarang dengan rata-rata investasi Rp.968.213.300.000,00 pertahunnya. Persamaan ketiga kabupaten/kota tersebut yaitu memiliki sektor potensial di bidang industri dan perdagangan. Daerah yang memiliki rata-rata investasi terendah adalah kabupaten Blora sebesar Rp.37.017.000.000,00.

4.1.2.3. Angkatan Kerja

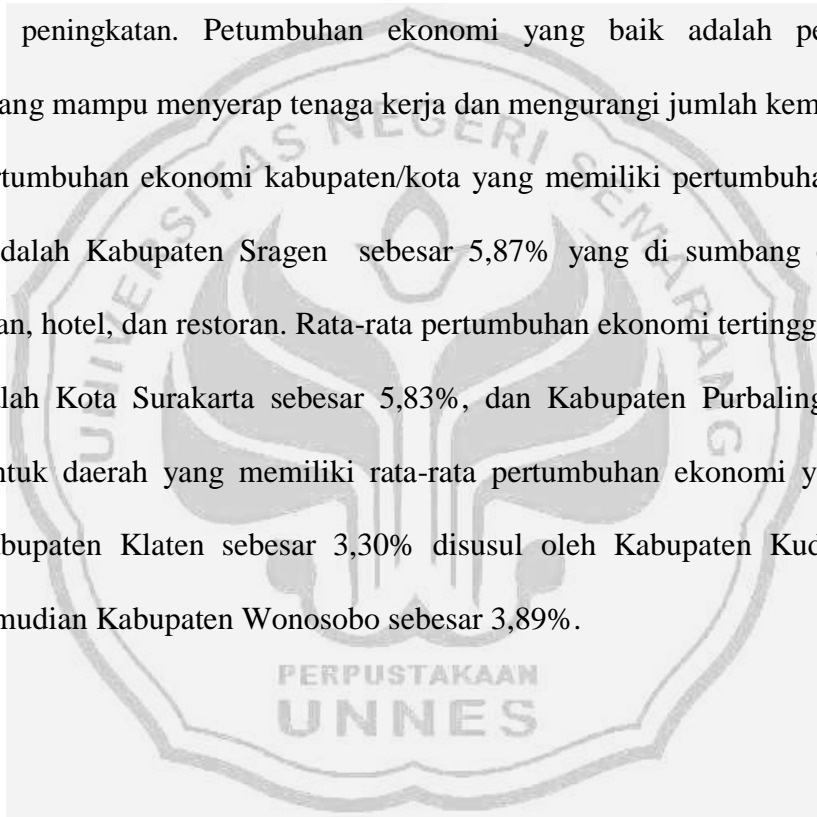
Angkatan kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan karena merekalah yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi.

Jumlah angkatan kerja dari tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi peningkatan total jumlah tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah sedangkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penurunan total jumlah tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah. Selama tahun 2007-2010, terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi yang besar dan terkecil terhadap jumlah angkatan kerja. Kabupaten Brebes selama tahun 2007-2010 merupakan daerah yang selalu berkontribusi terbesar dalam jumlah angkatan kerja, sedangkan Kota Magelang selama tahun 2007-2010 berkontribusi terkecil terhadap angkatan kerja.

4.1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan 2000. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya maka sektor-sektor riil di dalam daerah tersebut juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sragen sebesar 5,87% yang di sumbang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dan ketiga adalah Kota Surakarta sebesar 5,83%, dan Kabupaten Purbalingga sebesar 5,76%. Untuk daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah Kabupaten Klaten sebesar 3,30% disusul oleh Kabupaten Kudus sebesar 3,84%, kemudian Kabupaten Wonosobo sebesar 3,89%.



4.2. Analisis Regresi Data Panel

4.2.1. Teknik Penaksiran Model

Agar model yang digunakan baik dan sesuai diperlukan Penaksiran model. Penaksiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model dan Fixed Effect Model*

Untuk membandingkan *common effect model* dengan *fixed effect model* maka dilakukan uji F statistik. Uji F pada dasarnya digunakan untuk membandingkan antara model *common effect* yang mengasumsikan model intersep untuk semua unit cross section sama dengan model *fixed effect* yang mengasumsikan bahwa berbeda dengan cross section. Uji F secara lengkap dapat dilihat di lampiran 7. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan maka dihasilkan F hitung sebesar 4.39875 dan F tabel dengan numerator 3 (k-1) dan denominator 136 (n-k) pada $\alpha = 5\%$ adalah 2,67. maka F hitung > F tabel, dengan demikian kita menolak hipotesis nol. Artinya asumsi bahwa intersep untuk semua unit cross section sama tidak berlaku, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model panel untuk mengestimasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 yang tepat adalah model *fixed effect*.

2. *Fixed Effect Model dan Random Effect Model*

1. *Redundant fixed effect-likelihood ratio*

Dari hasil pengujian (lihat lampiran 8) dapat diketahui bahwa nilai cross section F sebesar 22,276354 dengan probabilitas 0,0000 dan F tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df (34,102) adalah 1.603701. jadi F hitung > F tabel dan signifikan pada $\alpha =$

5% yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,0000. artinya pengambilan keputusan model yang digunakan adalah *fixed effect model*.

4.2.2. Pengujian Model

Pengujian model dalam penelitian ini meliputi uji statistik dan uji asumsi klasik sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik, agar prediksi yang dihasilkan lebih baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

4.2.2.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Masalah multikoleneartitas dapat dideteksi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) regresi model utama dibandingkan dengan nilai R^2 regresi parsialnya atau dikenal dengan istilah korelasi parsial (*examination of partialcorrelation*). Bila didapati nilai R^2 regresi model utama lebih besar daripada nilai R^2 regresi parsialnya, maka dikatakan model yang diteliti tidak terkena masalah multikolinearitas. Karena data panel menggunakan GLS maka multikolinieritas dapat diatasi.

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Regresi	R ²
Regresi Utama	0.963051
Regresi Parsial PAD	0.922680
Regresi Parsial Investasi	0.980016
Regresi Parsial Angkatan Kerja	0.998890

Sumber: Lampiran

Suatu model dikatakan bebas masalah multikolinieritas jika memenuhi $R^2 > r^1, r^2, r^3$. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel investasi dan angkatan kerja memiliki masalah dengan multikolinieritas. Menurut Gujarati (2004) pada umumnya masalah multikolinieritas sangat jarang terjadi pada data panel. Jika multikolinieritas terjadi maka dapat diabaikan dengan merujuk teori serta penelitian sebelumnya.

4.2.2.1.2 Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk melihat apakah di dalam penelitian terdapat masalah heterokedastisitas. Penelitian dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas apabila *error* atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya.

Tabel 4.4
Uji Heterokedastisitas

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.297302	3.247387	-1.631251	0.1059
LOG(PAD)	0.149816	0.052720	2.841718	0.0054
LOG(INV)	0.127815	0.022524	5.674511	0.0000
LOG(AK)	0.388708	0.213556	1.820166	0.0717

Sumber: Lampiran

Pada uji park diatas diketahui nilai t_{hitung} masing-masing variabel. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan:

H_0 : $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$; terjadi Homoskedastisitas

H_1 : $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; terjadi Heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah model penelitian ini terdapat heterokedastisitas harus mencari t_{tabel} terlebih dahulu. t_{tabel} pada $df = n-k$ pada $\alpha = 5\%$ menggunakan distribusi t didapatkan sebesar 1,645. Dengan melihat hasil uji park tabel 4.8, model regresi dalam penelitian ini menerima H_1 dan menolak H_0 yang artinya tidak ada heterokedastisitas.

4.2.2.1.3 Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test) untuk mengetahui adakah korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu dan ruang dalam model regresi linier. Jika DW statistik berada diantara $du < d < 4 - du$, maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Autokorelasi Positif	Daerah Ragu-ragu	Tidak ada Autokorelasi	Daerah Ragu-ragu	Autokorelasi Negatif
	dL	dU	4-dU	4-dL
	1,693	1,774	2,226	2,307
		2,1423		

Sumber: Lampiran

Gambar 4.1 Skema Autokolerasi

Dari hasil estimasi didapat nilai DW statistik sebesar 2,1423 pada seluruh populasi, dan jumlah variabel bebas didapat nilai du sebesar 1,774, dl sebesar 1,693, $4-du$ sebesar 2,226, dan $4-dL$ sebesar 2,307. Dengan melihat DW statistiknya maka tidak terdapat autokorelasi, dan menolak H_0 dalam model. Nilai DW statistik terletak antara $du < d < 4 - du$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima. Menurut Gujarati (2003:370) metode *General Least Square* (GLS) dapat menekan autokorelasi yang biasanya timbul dalam rumus OLS sebagai akibat kesalahan estimasi (*underestimate*) varians sehingga dengan metode GLS masalah dalam autokorelasi dapat diatasi. Estimasi data panel yang menggunakan *fixed effect* baik bersifat LSDV maupun GLS dapat mengabaikan terjadinya autokorelasi sehingga dengan menggunakan metode ini masalah autokorelasi sudah dapat teratasi.

4.2.2.2 Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini adalah uji koefisien determinasi (R^2), uji secara bersama-sama (uji F) dan uji parsial (uji t).

4.2.2.2.1 Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Rentang nilai R^2 ini adalah nol sampai 1, semakin R^2 mendekati nilai 1 berarti semakin besar variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengujian menggunakan fixed

effect model pengaruh PAD, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada lampiran 1 diperoleh R^2 sebesar 0,963051. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan pengangguran sebesar 96,30% sedangkan 3,70% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.2.2 Uji secara bersama-sama (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama dari variabel-variabel independen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai F-stat lebih kecil dari nilai alpha (α) sebesar 1 persen, 5 persen, atau 10 persen, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan variabel-variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Hasil regresi menggunakan *fixed effect model* pada lampiran 6 diperoleh F_{hitung} sebesar 71,85253 dengan probabilitas 0,1059. Hasil F_{tabel} dengan df numerator 3 dan denominator 136 diperoleh 2,67. $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, dan angkatan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.2.3 Uji parsial (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini adalah tabel uji statistik t pengaruh PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.5
Uji Statistik t

Variabel independen	Uji statistik t		t tabel $\alpha = 5\%$
	t hitung	prob	
PAD	2.841718	0.0054	1.645
Investasi	5.674511	0.0000	1.645
Angkatan Kerja	1.820166	0.0717	1.645

Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui t hitung variabel PAD 2,841718 dengan probabilitas 0.0054. Probabilitas $< \alpha = 5\%$ (0,05), dengan demikian pengambilan keputusan adalah PAD berpengaruh signifikan. Untuk t hitung variabel investasi diketahui 5,674511 dengan probabilitas 0.0000. Probabilitas $< \alpha = 5\%$ (0,05), dengan demikian pengambilan keputusan adalah investasi berpengaruh signifikan.. Untuk t hitung variabel angkatan kerja diketahui 1,820166 dengan probabilitas 0.0717. Probabilitas $< \alpha = 5\%$ (0,05), dengan demikian pengambilan keputusan adalah angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

4.2.2.4 Model Analisis Pooled Data

Berdasar analisis dengan pooled data menggunakan fixed effect dapat disajikan sebagai berikut:

$$PE = -5.297302 + 0.149816\text{LOG}(\text{PAD}) + 0.127815\text{LOG}(\text{INVEST}) + 0.388708\text{LOG}(\text{AK})$$

Berdasarkan model diatas variabel angkatan kerja memiliki pengaruh positif terbesar dengan nilai 0.388708 jadi dominasi pengaruh terbesar adalah variabel angkatan kerja. Nilai koefisien negatif maka dapat diartikan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi dan Angkatan Kerja dianggap tetap (konstan) maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan dari persamaan diatas adalah:

1. Koefisien regresi sebesar 0,149816 artinya jika PAD naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,14%
2. Koefisien regresi sebesar 0,127815 artinya jika investasi naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,12%.
3. Koefisien regresi sebesar 0,388708 artinya jika angkatan kerja naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,38%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam mengatur keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2010 mengalami kenaikan. Kenaikan setiap tahun ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah siap dalam mengelola keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Peningkatan PAD diperoleh dari peningkatan jumlah obyek pajak yang diserahkan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,14%. Dengan pembelanjaan yang tepat sasaran yakni dengan memperbaiki dan membangun fasilitas untuk potensi-potensi unggulan yang dimiliki daerah sehingga dapat

meningkatkan pendapatan bagi daerah maka diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

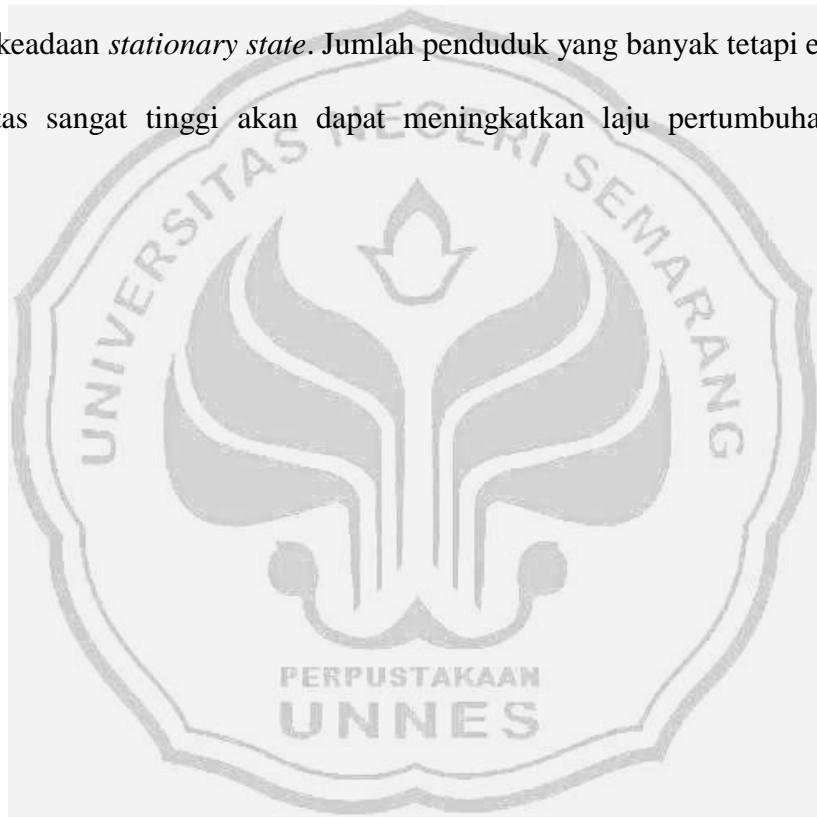
4.3.2 Investasi

Investasi swasta perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan investasi berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kenaikkan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat investasi yang besar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang tinggi. Masih rendahnya nilai investasi di Provinsi Jawa Tengah karena masih terjadi pungutan dalam melakukan investasi dan adanya perijinan yang memakan waktu yang lama sehingga investor kurang berminat untuk menginvestasikan modalnya. Rendahnya investasi di Jawa Tengah karena iklim investasi di Jawa Tengah diperburuk oleh rendahnya pelayanan publik dan kurangnya kepastian hukum. Pelayanan publik yang dikeluhkan terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berkaitan dengan perijinan dan birokrasi.

4.3.3 Angkatan Kerja

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak roda perekonomian daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38%. Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan angkatan kerja dalam jangka panjang akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke tahap yang lebih rendah, ini sesuai dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, karena dalam jangka panjang suatu perekonomian akan mencapai keadaan *stationary state*. Jumlah penduduk yang banyak tetapi efisiensi dan produktifitas sangat tinggi akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian daerah, dengan meningkatnya PAD dari tahun ke tahun merupakan gambaran Pemerintah Daerah telah siap mengelola keuangan daerah sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, cara untuk meningkatkan PAD yakni dengan pembelanjaan yang tepat sasaran di sektor potensial yang dimiliki daerah sehingga peningkatan PAD akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Investasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki investasi tinggi, akan diikuti dengan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Perekonomian yang lancar akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil ada pengaruh positif dan

signifikan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi di Provinsi Jawa Tengah masih rendah, hal ini tidak terlepas dari masih terjadinya proses perijinan yang sangat rumit sehingga biaya yang dikeluarkan investor sangat tinggi.

3. Angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk (bertambahnya angkatan kerja) dalam jangka panjang dapat menurunkan kembali pembangunan ke tahap yang lebih rendah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

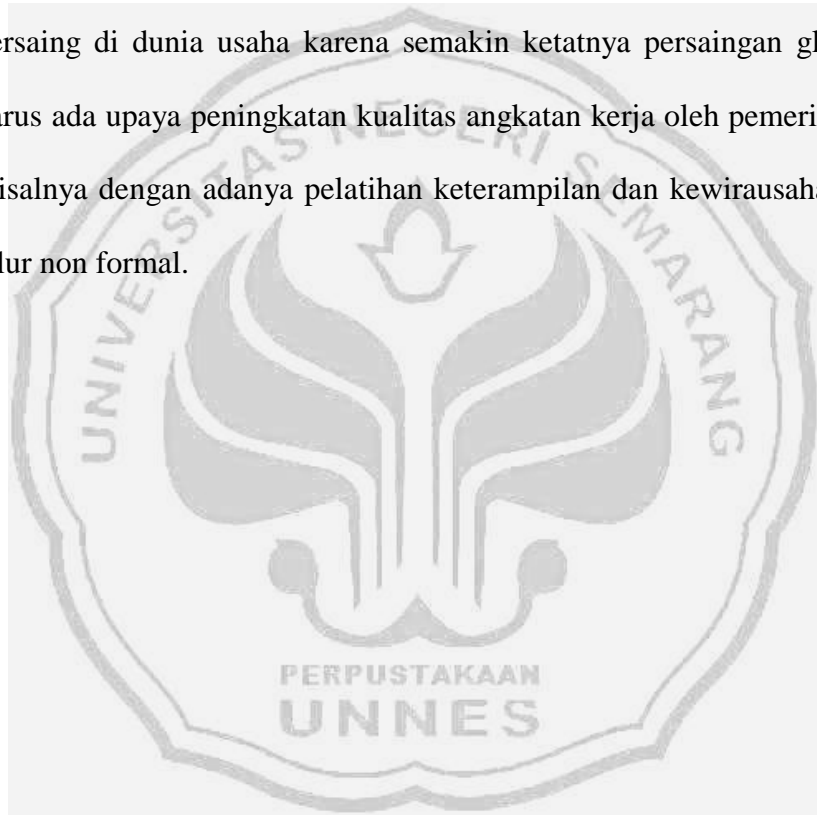
5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan dari kesimpulan yang di dapat maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah telah siap dalam otonomi daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerah sendiri. Untuk penelitian sejenis, disarankan untuk meneliti komponen didalam keuangan daerah seperti DAK, DAU, Pajak maupun Retribusi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Semakin berkembangnya investasi maka hendaknya Pemerintah Daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan iklim investasi yang kondusif akan mampu menarik investor. Penelitian ini menggunakan

investasi swasta baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, maka untuk penelitian sejenis hendaknya menggunakan investasi Pemerintah atau gabungan investasi swasta dan investasi Pemerintah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Besarnya angkatan kerja memberi kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja harus memiliki kualitas yang mampu bersaing di dunia usaha karena semakin ketatnya persaingan global, maka harus ada upaya peningkatan kualitas angkatan kerja oleh pemerintah daerah misalnya dengan adanya pelatihan keterampilan dan kewirausahaan melalui jalur non formal.



DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Rochmawati. 2008. Pengaruh Belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi pada Kab.Kota di Jawa Timur). *Tesis*. UNM. 2008
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2011. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2011*. Di publikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. (Edisi Alih Bahasa Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- _____. 2004. *Ekonometrika Dasar*. (Edisi Alih Bahasa Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D.Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N.Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi Edisi Ke Empat*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Harjanti, Erni Setyo. 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 1989-2003*. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Rahayu, Siti Aisyah Tri. 2000. *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: MEP UGM.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael, dan Smith, Stephen. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Tujuh*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wijayanti, Sri Nani. 2002. *Analisis Pengaruh PAD, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus*. Skripsi
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan statistik dengan Eviews*. Yogyakarta: STIM Yogyakarta.



LAMPIRAN



Lampiran 1**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010 (Juta Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
1	Cilacap	82.143.538	102.780.341	120.746.425	149.933.366
2	Banyumas	96.619.572	95.370.046	70.912.562	166.297.528
3	Purbalingga	52.744.391	63.795.294	81.617.693	62.486.768
4	Banjarnegara	44.873.490	46.521.397	60.636.815	60.278.746
5	Kebumen	58.524.924	58.599.425	63.016.363	58.742.306
6	Purworejo	44.187.840	51.174.860	60.814.317	66.325.413
7	Wonosobo	36.606.618	48.158.244	46.324.944	51.484.507
8	Magelang	69.962.597	78.119.511	75.398.029	75.962.298
9	Boyolali	67.461.523	63.733.408	73.985.149	86.485.635
10	Klaten	52.110.860	49.772.711	46.693.877	54.878.562
11	Sukoharjo	42.449.908	41.898.320	48.845.048	65.267.064
12	Wonogiri	50.329.495	54.129.295	57.092.965	64.968.769
13	Karanganyar	56.889.064	64.470.676	66.971.683	79.510.217
14	Sragen	65.157.983	65.561.026	72.681.309	79.627.348
15	Grobogan	51.564.443	66.232.767	46.890.617	78.364.888
16	Blora	41.620.458	48.954.141	49.696.651	47.071.084
17	Rembang	42.249.359	51.150.558	51.125.559	65.699.259
18	Pati	78.965.732	80.677.766	90.396.848	112.526.537
19	Kudus	55.181.545	56.440.909	73.709.952	94.032.693
20	Jepara	54.110.690	70.427.233	71.948.111	84.713.358
21	Demak	34.892.164	43.817.076	50.235.870	39.619.757
22	Semarang	70.860.501	82.942.881	90.389.871	93.830.000
23	Temanggung	34.884.602	37.773.970	47.300.791	55.206.018
24	Kendal	75.741.769	71.685.167	76.805.714	86.235.294
25	Batang	30.968.198	41.192.715	44.643.602	45.421.962
26	Pekalongan	42.341.232	50.136.941	58.468.320	67.780.239
27	Pemalang	55.835.580	66.747.479	81.819.334	76.441.045
28	Tegal	63.363.141	67.851.231	70.551.139	73.061.018
29	Brebes	65.350.835	71.896.767	80.275.021	71.030.000
30	Kota Magelang	35.814.845	40.549.584	47.704.619	59.548.102
31	Kota Surakarta	88.034.379	102.989.919	101.972.318	120.183.277
32	Kota Salatiga	36.192.748	45.149.902	52.911.035	52.294.851
33	Kota Semarang	238.237.999	267.914.250	306.112.423	327.992.259
34	Kota Pekalongan	25.737.351	25.587.659	32.238.176	47.495.707
35	Kota Tegal	62.259.147	69.567.244	90.840.877	101.321.867
	Total	2.104.268.522	2.275.919.483	2.561.684.027	2.757.257.742

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011

Lampiran 2

**Nilai Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010 (jutaan rupiah)**

No.	Kabupaten	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Cilacap	77.654	79.866	126.213	195.958	119.923
2	Banyumas	201.114	222.285	376.318	463.309	315.757
3	Purbalingga	42.283	55.189	82.139	79.253	64.716
4	Banjarnegara	80.654	105.708	108.152	149.796	111.078
5	Kebumen	33.459	44.806	73.840	93.207	61.328
6	Purworejo	51.721	38.452	36.581	67.766	48.630
7	Wonosobo	28.461	34.784	67.363	74.137	51.186
8	Magelang	214.308	339.566	326.136	186.353	266.591
9	Boyolali	26.775	32.636	73.270	144.168	69.212
10	Klaten	84.740	108.183	139.279	178.764	127.742
11	Sukoharjo	254.411	498.791	495.314	323.395	392.978
12	Wonogiri	113.961	160.540	188.932	215.117	169.638
13	Karanganyar	406.057	681.288	738.928	710.328	634.150
14	Sragen	213.236	930.038	578.192	533.438	563.726
15	Grobogan	49.568	107.812	91.623	117.695	91.675
16	Blora	22.810	25.602	32.076	67.578	37.017
17	Rembang	21.893	884.784	1.697.232	1.355.315	989.806
18	Pati	62.066	131.543	379.537	240.819	203.491
19	Kudus	227.118	340.050	524.139	547.188	409.624
20	Jepara	80.963	75.638	116.145	134.760	101.877
21	Demak	179.377	134.824	81.322	160.718	139.060
22	Semarang	981.246	895.142	871.469	1.124.994	968.213
23	Temanggung	42.492	56.070	54.491	70.142	55.799
24	Kendal	379.956	358.749	542.003	339.892	405.150
25	Batang	39.606	30.442	44.606	70.918	46.393
26	Pekalongan	33.607	28.228	42.311	93.244	49.348
27	Pemalang	37.823	63.400	75.837	87.558	66.155
28	Tegal	212.536	139.392	204.560	247.648	201.034
29	Brebes	88.559	88.909	118.833	131.332	106.908
30	Kota Magelang	43.102	74.267	100.623	158.229	94.055
31	Kota Surakarta	445.022	513.270	600.330	569.899	532.130
32	Kota Salatiga	59.002	89.215	80.168	106.298	83.671
33	Kota Semarang	1.585.777	2.085.933	2.203.863	2.907.523	2.195.774
34	Kota Pekalongan	73.189	74.286	74.593	87.349	77.354
35	Kota Tegal	96.667	82.160	120.632	99.933	99.848

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 3

**Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010 (orang)**

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
1	Cilacap	717.158	667.795	689.485	688.049
2	Banyumas	663.991	658.221	680.460	733.609
3	Purbalingga	391.558	381.458	401.829	418.945
4	Banjarnegara	448.081	435.466	430.667	452.617
5	Kebumen	583.982	541.525	557.099	537.808
6	Purworejo	369.993	340.338	341.263	341.033
7	Wonosobo	386.257	366.045	380.776	381.326
8	Magelang	636.038	592.811	600.436	629.239
9	Boyolali	530.864	505.189	512.634	506.987
10	Klaten	584.022	568.190	577.901	548.672
11	Sukoharjo	426.623	411.496	414.058	400.526
12	Wonogiri	539.364	525.547	550.876	495.295
13	Karanganyar	434.400	425.444	417.838	427.435
14	Sragen	472.881	449.446	466.332	463.749
15	Grobogan	728.345	662.039	720.700	688.296
16	Blora	470.679	432.057	457.502	441.334
17	Rembang	295.457	280.904	302.260	304.638
18	Pati	608.257	571.512	590.171	581.998
19	Kudus	413.132	415.136	406.909	394.361
20	Jejara	538.251	498.129	533.446	536.754
21	Demak	529.853	500.484	494.917	492.570
22	Semarang	471.179	473.928	470.675	502.705
23	Temanggung	395.799	367.563	372.741	396.063
24	Kendal	529.205	482.124	489.173	447.120
25	Batang	348.619	328.391	322.932	353.214
26	Pekalongan	415.685	393.764	412.482	401.931
27	Pemalang	597.939	546.418	567.795	515.127
28	Tegal	668.44	608.179	590.539	585.618
29	Brebes	818.71	759.391	760.430	812.098
30	Kota Magelang	55.670	54.554	56.107	53.719
31	Kota Surakarta	260.68	251.101	246.768	235.998
32	Kota Salatiga	76.775	77.273	78.668	73.329

33	Kota Semarang	663.053	658.729	703.602	724.687
34	Kota Pekalongan	125.564	127.853	133.326	134.984
35	Kota Tegal	107.554	105.158	102.585	107.613
	Total	16.304.058	15.463.658	15.835.382	15.809.447

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011



Lampiran 4

**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2010 (persen)**

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Cilacap	4,87	6,07	1,53	4,43	4,22
2	Banyumas	5,30	5,38	5,49	5,77	5,48
3	Purbalingga	6,19	5,30	5,89	5,67	5,76
4	Banjarnegara	5,01	4,98	5,11	4,89	4,99
5	Kebumen	4,52	5,80	3,94	4,15	4,60
6	Purworejo	6,08	5,62	4,96	5,01	5,41
7	Wonosobo	3,58	3,69	4,02	4,29	3,89
8	Magelang	5,21	4,99	4,72	4,51	4,85
9	Boyolali	4,08	4,04	5,16	3,60	4,22
10	Klaten	3,31	3,93	4,24	1,73	3,30
11	Sukoharjo	5,11	4,84	4,76	4,65	4,84
12	Wonogiri	5,07	4,27	4,73	3,14	4,30
13	Karanganyar	5,74	5,30	5,54	5,42	5,50
14	Sragen	5,73	5,69	6,01	6,06	5,87
15	Grobogan	4,37	5,33	5,03	5,05	4,94
16	Blora	3,77	5,80	4,97	5,04	4,89
17	Rembang	3,81	4,67	4,46	4,45	4,34
18	Pati	5,19	4,94	4,69	5,11	4,98
19	Kudus	3,33	3,92	3,95	4,16	3,84
20	Jepara	4,74	4,49	5,02	4,52	4,69
21	Demak	4,15	4,11	4,08	4,12	4,11
22	Semarang	4,72	4,26	4,37	4,90	4,56
23	Temanggung	4,03	3,54	4,09	4,31	3,99
24	Kendal	4,31	4,26	5,55	5,95	5,01
25	Batang	3,49	3,67	3,72	4,97	3,96
26	Pekalongan	4,59	4,78	4,30	4,27	4,48
27	Pemalang	4,47	4,99	4,78	4,94	4,79
28	Tegal	5,59	5,32	5,29	4,83	5,25
29	Brebes	4,79	4,81	4,99	4,94	4,88
30	Kota Magelang	5,17	5,05	5,11	6,12	5,36
31	Kota Surakarta	5,82	5,69	5,90	5,94	5,83
32	Kota Salatiga	5,39	4,98	4,48	5,01	4,96
33	Kota Semarang	5,98	5,59	5,34	5,87	5,69

34	Kota Pekalongan	3,80	3,73	4,78	5,51	4,45
35	Kota Tegal	5,21	5,15	5,02	4,61	4,99

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi



LAMPIRAN 5**Input Data Olahan 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010**

No	Kabupaten/Kota	PAD	INVESTASI	ANGKATAN KERJA	PERTUMBUHAN EKONOMI
1	Kabupaten Cilacap	82,143,538	77,654,000	717,158	4.87
	Kabupaten Cilacap	102,780,341	79,866,000	667,795	4.92
	Kabupaten Cilacap	120,746,425	126,213,000	689,485	5.25
	Kabupaten Cilacap	149,933,366	195,958,000	688,049	5.65
2	Kabupaten Banyumas	96,619,572	201,144,000	663,991	5.30
	Kabupaten Banyumas	95,370,046	222,285,000	658,221	5.38
	Kabupaten Banyumas	70,912,562	376,318,000	680,460	5.49
	Kabupaten Banyumas	166,297,528	463,309,000	733,609	5.57
3	Kabupaten Purbalingga	52,744,391	42,283,000	391,558	6.19
	Kabupaten Purbalingga	63,795,294	55,189,000	381,458	5.30
	Kabupaten Purbalingga	81,617,693	82,139,000	401,829	5.89
	Kabupaten Purbalingga	62,486,768	79,253,000	418,945	5.67
4	Kabupaten Banjarnegara	44,873,490	80,654,000	448,081	5.01
	Kabupaten Banjarnegara	46,521,397	105,708,000	435,466	4.98
	Kabupaten Banjarnegara	60,636,815	108,152,000	430,667	5.11
	Kabupaten Banjarnegara	60,278,746	149,796,000	452,617	4.89
5	Kabupaten Kebumen	58,524,924	33,459,000	583,982	4.52
	Kabupaten Kebumen	58,599,425	44,806,000	541,525	5.80
	Kabupaten Kebumen	63,016,363	73,840,000	557,099	3.94
	Kabupaten Kebumen	58,742,306	93,207,000	537,808	4.15
6	Kabupaten Purworejo	44,187,840	51,721,000	369,993	6.08
	Kabupaten Purworejo	51,174,860	38,452,000	340,338	5.62
	Kabupaten Purworejo	60,814,317	36,581,000	341,263	4.96
	Kabupaten Purworejo	66,325,413	67,766,000	341,033	5.01
7	Kabupaten	36,606,618	28,461,000	386,257	3.58

	Wonosobo				
	Kabupaten Wonosobo	48,158,244	34,784,000	366,045	3.69
	Kabupaten Wonosobo	46,324,944	67,363,000	380,776	4.02
	Kabupaten Wonosobo	51,484,507	74,137,000	381,326	4.29
8	Kabupaten Magelang	69,962,597	214,308,000	636,038	5.21
	Kabupaten Magelang	78,119,511	339,566,000	592,811	4.99
	Kabupaten Magelang	75,398,029	326,136,000	600,436	4.72
	Kabupaten Magelang	75,962,298	186,353,000	629,239	4.51
9	Kabupaten Boyolali	67,461,523	26,775,000	530,864	4.08
	Kabupaten Boyolali	63,733,408	32,636,000	505,189	4.04
	Kabupaten Boyolali	73,985,149	73,270,000	512,534	5.16
	Kabupaten Boyolali	86,485,635	144,168,000	506,987	3.60
10	Kabupaten Klaten	52,110,860	84,740,000	584,022	3.31
	Kabupaten Klaten	49,772,711	108,183,000	568,190	3.93
	Kabupaten Klaten	46,693,877	139,279,000	577,901	4.24
	Kabupaten Klaten	54,878,562	178,764,000	548,672	1.73
11	Kabupaten Sukoharjo	42,449,908	254,411,000	426,623	5.11
	Kabupaten Sukoharjo	41,898,320	498,791,000	411,496	4.84
	Kabupaten Sukoharjo	48,845,048	495,314,000	414,058	4.76
	Kabupaten Sukoharjo	65,267,064	323,395,000	400,526	4.65
12	Kabupaten Wonogiri	50,329,495	113,961,000	539,364	5.07
	Kabupaten Wonogiri	54,129,295	160,540,000	525,547	4.27
	Kabupaten Wonogiri	57,092,965	188,932,000	550,876	4.73
	Kabupaten Wonogiri	64,968,769	215,117,000	495,295	3.14
13	Kabupaten Karanganyar	56,889,064	406,057,000	434,400	5.74
	Kabupaten Karanganyar	64,470,676	681,288,000	425,444	5.30
	Kabupaten Karanganyar	66,971,683	738,928,000	417,838	5.54
	Kabupaten Karanganyar	79,510,217	710,328,000	427,435	5.42
14	Kabupaten Sragen	65,157,983	213,236,000	472,881	5.73
	Kabupaten Sragen	65,561,026	930,038,000	449,446	5.69
	Kabupaten Sragen	72,681,309	578,192,000	466,332	6.01
	Kabupaten Sragen	79,627,348	533,438,000	463,749	6.06

15	Kabupaten Grobogan	51,564,443	49,568,000	728,345	4.37
	Kabupaten Grobogan	66,232,767	107,812,000	662,039	5.33
	Kabupaten Grobogan	46,890,617	91,623,000	720,700	5.03
	Kabupaten Grobogan	78,364,888	117,695,000	688,296	5.05
16	Kabupaten Blora	41,620,458	22,810,000	470,679	3.77
	Kabupaten Blora	48,954,141	25,602,000	432,057	5.80
	Kabupaten Blora	49,696,651	32,076,000	457,502	4.97
	Kabupaten Blora	47,071,084	67,578,000	441,334	5.04
17	Kabupaten Rembang	42,249,359	21,893,000	295,457	3.81
	Kabupaten Rembang	51,150,558	884,784,000	280,904	4.67
	Kabupaten Rembang	51,125,559	1,697,232,000	302,260	4.46
	Kabupaten Rembang	65,699,259	1,355,315,000	304,638	4.45
18	Kabupaten Pati	78,965,732	62,066,000	608,657	5.19
	Kabupaten Pati	80,677,766	131,543,000	571,512	4.94
	Kabupaten Pati	90,396,848	379,537,000	590,171	4.69
	Kabupaten Pati	112,526,537	240,819,000	581,998	5.11
19	Kabupaten Kudus	55,181,545	227,118,000	413,132	3.33
	Kabupaten Kudus	56,440,909	340,050,000	415,136	3.92
	Kabupaten Kudus	73,709,952	524,139,000	406,909	3.95
	Kabupaten Kudus	94,032,693	547,188,000	394,361	4.16
20	Kabupaten Jepara	54,110,690	80,963,000	538,251	4.74
	Kabupaten Jepara	70,427,233	75,638,000	498,129	4.49
	Kabupaten Jepara	71,948,111	116,145,000	533,446	5.02
	Kabupaten Jepara	84,713,358	134,760,000	536,754	4.52
21	Kabupaten Demak	34,892,164	179,377,000	529,853	4.15
	Kabupaten Demak	43,817,076	134,824,000	500,484	4.11
	Kabupaten Demak	50,235,870	81,322,000	494,917	4.08
	Kabupaten Demak	39,619,757	160,718,000	492,570	4.12
22	Kabupaten Semarang	70,860,501	981,246,000	471,179	4.72
	Kabupaten Semarang	82,942,881	895,142,000	473,928	4.26
	Kabupaten Semarang	90,389,871	871,469,000	470,675	4.37
	Kabupaten Semarang	93,830,000	1,124,994,000	502,705	4.90
23	Kabupaten Temanggung	34,884,602	42,492,000	395,799	4.03

	Kabupaten Temanggung	37,773,970	56,070,000	367,563	3.54
	Kabupaten Temanggung	47,300,791	54,491,000	372,741	4.09
	Kabupaten Temanggung	55,206,018	70,142,000	396,063	4.31
24	Kabupaten Kendal	75,741,769	379,956,000	529,205	4.31
	Kabupaten Kendal	71,685,167	358,749,000	482,124	4.26
	Kabupaten Kendal	76,805,714	542,003,000	489,173	5.55
	Kabupaten Kendal	86,235,294	339,892,000	447,120	5.95
25	Kabupaten Batang	30,968,198	39,606,000	348,619	3.49
	Kabupaten Batang	41,192,715	30,442,000	328,391	3.67
	Kabupaten Batang	44,643,602	44,606,000	322,932	3.72
	Kabupaten Batang	45,421,962	70,918,000	353,214	4.97
26	Kabupaten Pekalongan	42,341,232	33,607,000	415,685	4.59
	Kabupaten Pekalongan	50,136,941	28,228,000	393,764	4.78
	Kabupaten Pekalongan	58,468,320	42,311,000	412,482	4.30
	Kabupaten Pekalongan	67,780,239	93,244,000	401,931	4.27
27	Kabupaten Pemalang	55,835,580	37,823,000	597,939	4.47
	Kabupaten Pemalang	66,747,479	63,400,000	546,418	4.99
	Kabupaten Pemalang	81,819,334	75,837,000	567,795	4.78
	Kabupaten Pemalang	76,441,045	87,558,000	515,127	4.94
28	Kabupaten Tegal	63,363,141	212,536,000	668,440	5.59
	Kabupaten Tegal	67,851,231	139,392,000	608,179	5.32
	Kabupaten Tegal	70,551,139	204,560,000	590,539	5.29
	Kabupaten Tegal	73,061,018	247,648,000	585,618	4.83
29	Kabupaten Brebes	65,350,835	88,559,000	818,710	4.79
	Kabupaten Brebes	71,896,767	88,909,000	759,391	4.81
	Kabupaten Brebes	80,275,021	118,833,000	760,430	4.99
	Kabupaten Brebes	71,030,000	131,332,000	812,098	4.94
30	Kota Magelang	35,814,845	43,102,000	55,670	5.17
	Kota Magelang	40,549,584	74,267,000	54,554	5.05
	Kota Magelang	47,704,619	100,623,000	56,107	5.11
	Kota Magelang	59,548,102	158,229,000	53,719	6.12

31	Kota Surakarta	88,034,379	445,022,000	260,680	5.82
	Kota Surakarta	102,989,919	513,270,000	251,101	5.69
	Kota Surakarta	101,972,318	600,330,000	246,768	5.90
	Kota Surakarta	120,183,277	569,899,000	235,998	5.94
32	Kota Salatiga	36,192,748	59,002,000	76,775	5.39
	Kota Salatiga	45,149,902	89,215,000	77,273	4.98
	Kota Salatiga	52,911,035	80,168,000	78,668	4.48
	Kota Salatiga	52,294,851	106,298,000	73,329	5.01
33	Kota Semarang	238,337,999	1,585,777,000	663,053	5.98
	Kota Semarang	267,914,250	2,085,933,000	658,729	5.59
	Kota Semarang	306,112,423	2,203,863,000	703,602	5.34
	Kota Semarang	327,992,259	2,907,523,000	724,687	5.87
34	Kota Pekalongan	25,737,351	73,189,000	125,564	3.80
	Kota Pekalongan	25,587,659	74,286,000	127,853	3.73
	Kota Pekalongan	32,238,176	74,593,000	133,326	4.78
	Kota Pekalongan	47,495,707	87,349,000	134,984	5.51
35	Kota Tegal	62,259,147	96,667,000	107,554	5.21
	Kota Tegal	69,567,244	82,160,000	105,158	5.15
	Kota Tegal	90,840,877	120,632,000	102,585	5.02
	Kota Tegal	101,321,867	99,933,000	107,613	4.61

LAMPIRAN 6**Hasil Fixed Effect Model**

Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 02/20/13 Time: 22:23

Sample: 2007 2010

Periods included: 4

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 140

Linear estimation after one-step weighting matrix

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.297302	3.247387	-1.631251	0.1059
LOG(PAD)	0.149816	0.052720	2.841718	0.0054
LOG(INV)	0.127815	0.022524	5.674511	0.0000
LOG(AK)	0.388708	0.213556	1.820166	0.0717

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.963051	Mean dependent var	10.74831
Adjusted R-squared	0.949648	S.D. dependent var	13.76370
S.E. of regression	0.467521	Sum squared resid	22.29477
F-statistic	71.85253	Durbin-Watson stat	2.142385
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.688697	Mean dependent var	4.807500
Sum squared resid	23.83078	Durbin-Watson stat	2.152327

LAMPIRAN 7

1.1. Penaksiran model

a. *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*

Uji F statistik

$$\text{Perhitungan uji F statistik} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(n-1)}{(RSS_2/(nT-n-K))}$$

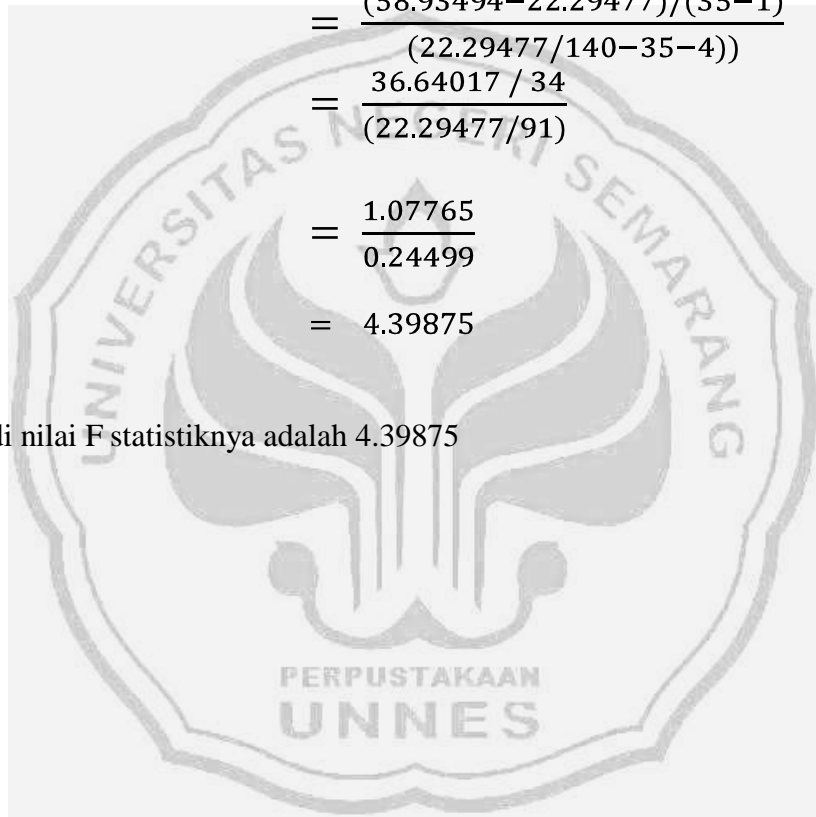
$$= \frac{(58.93494 - 22.29477)/(35-1)}{(22.29477/140-35-4)}$$

$$= \frac{36.64017 / 34}{(22.29477/91)}$$

$$= \frac{1.07765}{0.24499}$$

$$= 4.39875$$

Jadi nilai F statistiknya adalah 4.39875



LAMPIRAN 8

b. Fixed Effect Model dengan Random Effect Model

- Uji Likelihood

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXEDEF

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.276354	(34,102)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 02/20/13 Time: 22:30

Sample: 2007 2010

Periods included: 4

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 140

Use pre-specified GLS weights

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.69904	2.396953	-6.966776	0.0000
LOG(PAD)	1.096206	0.131836	8.314913	0.0000
LOG(INV)	0.238135	0.073521	3.239001	0.0015
LOG(AK)	-0.213820	0.093159	-2.295230	0.0233

Weighted Statistics

R-squared	0.688686	Mean dependent var	10.74831
Adjusted R-squared	0.681819	S.D. dependent var	13.76370
S.E. of regression	1.175246	Sum squared resid	187.8435
F-statistic	100.2860	Durbin-Watson stat	0.652810
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.027856	Mean dependent var	4.807500
Sum squared resid	74.41919	Durbin-Watson stat	0.771516

LAMPIRAN 9

• Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANOMEFF

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.430544	3	0.0060

** WARNING: robust standard errors may not be consistent with assumptions of Hausman test variance calculation.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PAD)	0.273449	0.601369	0.014921	0.0073
LOG(INV)	0.080165	0.054936	0.000838	0.3834
LOG(AK)	1.082023	-0.213784	1.323896	0.2601

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PE

Method: Panel Least Squares

Date: 02/20/13 Time: 22:31

Sample: 2007 2010

Periods included: 4

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 140

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.56226	15.82490	-0.983404	0.3277
LOG(PAD)	0.273449	0.218885	1.249284	0.2144
LOG(INV)	0.080165	0.073269	1.094116	0.2765
LOG(AK)	1.082023	1.158240	0.934196	0.3524

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.690317	Mean dependent var	4.807500
Adjusted R-squared	0.577981	S.D. dependent var	0.742113
S.E. of regression	0.482099	Akaike info criterion	1.604851
Sum squared resid	23.70674	Schwarz criterion	2.403297
Log likelihood	-74.33957	Hannan-Quinn criter.	1.929315
F-statistic	6.145110	Durbin-Watson stat	2.177096
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 10

Uji Multikolinieritas

Dependent Variable: LOG(PAD)
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 02/20/13 Time: 22:39
 Sample: 2007 2010
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.65792	1.972309	13.51610	0.0000
LOG(INV)	0.142457	0.018740	7.601699	0.0000
LOG(AK)	-0.881182	0.146305	-6.022921	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.922680	Mean dependent var	26.45707
Adjusted R-squared	0.895656	S.D. dependent var	16.65446
S.E. of regression	0.154646	Sum squared resid	2.463286
F-statistic	34.14255	Durbin-Watson stat	1.865909
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.893135	Mean dependent var	17.97421
Sum squared resid	2.528900	Durbin-Watson stat	1.814163

Dependent Variable: LOG(INV)
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 02/20/13 Time: 22:41
 Sample: 2007 2010
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f.
 correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.570391	6.334096	-1.037305	0.3020
LOG(AK)	0.209034	0.452121	0.462340	0.6448
LOG(PAD)	1.260715	0.107481	11.72964	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.980016	Mean dependent var	36.19942
Adjusted R-squared	0.973031	S.D. dependent var	20.46310
S.E. of regression	0.459745	Sum squared resid	21.77064
F-statistic	140.3084	Durbin-Watson stat	2.245434
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.868618	Mean dependent var	18.78472
Sum squared resid	21.96672	Durbin-Watson stat	1.829779

Dependent Variable: LOG(AK)
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 02/20/13 Time: 22:42
 Sample: 2007 2010
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f.
 correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.84821	0.224498	61.68518	0.0000
LOG(PAD)	-0.049210	0.014883	-3.306492	0.0013
LOG(INV)	-0.003846	0.005755	-0.668229	0.5055

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.998890	Mean dependent var	15.90397
Adjusted R-squared	0.998502	S.D. dependent var	6.271216
S.E. of regression	0.037076	Sum squared resid	0.141583
F-statistic	2574.886	Durbin-Watson stat	2.467841
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.997194	Mean dependent var	12.89146
Sum squared resid	0.145915	Durbin-Watson stat	2.119563